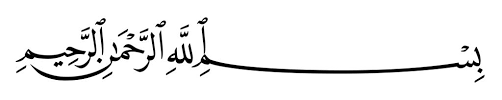


**UNIVERSITAS ‘AISYIYAH YOGYAKARTA**

**TUGAS SEMINAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mata Kuliah / Kode MK | : Formulasi Kebijakan/ADP4018 | Program Studi | : Administrasi Publik |
| Semester / Kelas | : IV/K | Dosen | 1. Nur Faidati, SIP, MA |
| Nama | : ADI SUKRIANTO | NIM | : 1911001023 |

******

MEKANISME PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS)

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis (UU Nomor 12 Tahun 2011, pasal 1 angka 9). Prolegnas merupakan tahap awal dari proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pada tahapan perencanaan. Dalam pasal 1 angka 9 tersebut Prolegnas diartikan sebagai instrument atau suatu mekanisme, disamping itu secara operasionalnya sering dipakai dalam arti yang merujuk pada materi atau substansi rencana pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011dikatakan “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Dari sini dapat diketahui bahwa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

|  |  |
| --- | --- |
| TAHAP | URAIAN |
| PERENCANAAN | * Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. * Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:  1. Perintah UUD 45; 2. Perintah Tap MPR; 3. Perintah UU lainnya; 4. Sistem perencanaan pembangunan nasional; 5. Rencana pembangunan jangka panjang nasional; 6. Rencana pembangunan jangka menengah; 7. Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan 8. Aspirasi dan kebutuhan hukuim masyarakat.  * Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah. |
| PENYUSUNAN | * RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. * RUU disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. * Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. |
| PEMBAHASAN | * Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. * Pembahasaan RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Tingkat II dalam rapat paripurna. |
| PENGESAHAN | * RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. * Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. * RUU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. |
| PENGUNDANGAN | * Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:  1. Lembaran Negara Republik Indonesia; 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 3. Berita Negara Republik Indonesia; 4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; 5. Lembaran Daerah; 6. Tambahan Lembaran Daerah; atau 7. Berita Daerah.  * Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. |
| PENYEBARLUASAN | * Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU, hingga Pengundangan Undang-Undang. |

CONTOH :

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

* Tanggal 17 Desember 2019: RUU diusulkan
* Tanggal 13 Februari 2020: Pembicaraan Tingkat I, Rapat Kerja
* Tanggal 13 Februari 2020: Pembicaraan Tingkat I, Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kumham, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan
* Tanggal 18 Februari 2020: Pembicaraan Tingkat I, pembahasan DIM RUU
* Tanggal 11 Maret 2020: Pembicaraan Tingkat I, Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI
* Tanggal 07 April 2020: Pembicaraan Tingkat I, Public Hearing
* Tanggal 27 April 2020: pandangan dan masukan DPD RI terhadap RUU yang diusulkan
* Tanggal 06 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat I, Rapat Panja RUU Minerba
* Tanggal 11 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat I, Laporan Panja Minerba ke Komisi VII DPR RI
* Tanggal 11 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Mini Fraksi terhadap RUU Minerba
* Tanggal 12 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat II, Laporan Pimpinan Komisi VII DPR RI ke Rapat Paripurna terkait RUU Minerba
* Tanggal 12 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat II, Pidato Menteri ESDM RI di Rapat Paripurna terkait RUU Minerba
* Tanggal 12 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat II, Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi Undang-Undang
* Tanggal 15 Mei 2020: Pembicaraan Tingkat II, Kronologis proses penyusunan hingga pembahasan RUU
* Tanggal 10 Juni 2020: RUU disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Presiden.
* Tanggal 10 Juni 2020: UU No 3 Tahun 2020 diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 147 oleh Menteri Hukum dan HAM.